



PROBLEMATISASI PARADIGMA SUSTAINABLE DEVELOPMENT DAN KEADILAN EKOLOGIS BAGI NEGARA BERKEMBANG

**^{1*}Mustabsyirotul Ummah Mustofa, ²Azura Marha Rafifah, ³Avrilia
Zalzabila, ⁴Meliyana Sari, ⁵Alya Rosianawati, ⁶Muhammad Andi
Firmansyah, ⁷Habib Yudha Pratama, ⁸Rahsy Nigitama**

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas
Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

Email: mustabsyirotul.ummah@unpad.ac.id

Received March 2025; Revised: May 2025; Accepted: May 2025; Published: May 2025; Available online: May 2025

ABSTRAK

Artikel ini membahas problematisasi paradigma sustainable development dan keadilan ekologis dalam konteks negara berkembang. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global yang penting, tetapi sering kali paradigma ini cenderung terlalu teknokratis, mengabaikan aspek keadilan ekologis yang krusial. Negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang kompleks dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, terutama ketika paradigma ini lebih menekankan pertumbuhan ekonomi daripada keseimbangan ekologis dan distribusi kekayaan yang adil. Konflik yang muncul ketika negara-negara berkembang berusaha mengikuti model pembangunan berkelanjutan yang sering kali diimpor dari negara-negara maju. Paradigma pembangunan berkelanjutan yang terlalu teknokratis dapat mengabaikan konteks sosial, ekonomi, dan ekologis yang unik di negara-negara berkembang, dan ini bisa menyebabkan ketidaksetaraan ekologis dan ketidakadilan sosial. Keadilan ekologis menjadi sentral dalam mengatasi permasalahan ini. Artikel ini juga membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki paradigma pembangunan berkelanjutan agar lebih mempertimbangkan aspek keadilan ekologis, sekaligus menciptakan solusi yang relevan dan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, penting untuk mengintegrasikan perspektif lokal, melibatkan masyarakat setempat, dan mengakui hak negara-negara berkembang untuk mengejar pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan realitas mereka sendiri.

Key Word: Negara Berkembang, Keadilan Ekologis, Sustainable Development

PENDAHULUAN

Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) adalah konsep yang telah menjadi norma internasional dan menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Sebagai bagian dari norma internasional, sustainable development memainkan peran penting dalam membentuk perilaku negara-negara dan aktor-aktor internasional. Norma yang dibentuk berdasarkan tujuan bagaimana norma deskriptif (bagaimana dunia seharusnya) dan norma preskriptif (bagaimana negara dan aktor seharusnya bertindak) (Finnemore & Sikkink, 1998). Norma ini diberlakukan sebagai model upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) telah menjadi norma global karena diterima secara luas oleh komunitas internasional. Negara-negara, organisasi internasional, dan banyak pemangku kepentingan lainnya berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan sustainable development.

Norma Internasional ini menjadi pertanda bahwa penerima hibah atau bantuan internasional harus mematuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pencapaian sustainable

development. Penerima bantuan harus menunjukkan komitmen mereka untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan praktik mereka. Mereka juga mungkin harus menyusun rencana tindakan konkret untuk mencapai target-target sustainable development dan mengukur kemajuan mereka secara berkala. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pencapaian sustainable development dapat menjadi faktor penting dalam menentukan akses terhadap hibah atau bantuan internasional.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor kunci dalam upaya negara-negara berkembang untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan, dan kurangnya akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat membantu negara-negara ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui SDGs, tuntutan pertumbuhan ekonomi mereka dapat dicapai dengan kerjasama internasional, bantuan luar negeri, dan akses ke pasar global, dengan disediakannya kerangka kerja yang komprehensif yang mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan. Dalam hal ini, kerjasama internasional dan dukungan dari komunitas global dapat menjadi faktor penting dalam mencapai SDGs.

Intervensi aktor-aktor global menjadi salah satu yang dapat menentukan suksesnya misi SDGs. Alih-alih peran aktor-aktor dalam mendorong pertumbuhan ekonominya, konflik antara SDGs dan pertumbuhan ekonomi muncul di negara-negara berkembang karena ketegangan antara upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan upaya untuk menjaga lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keadilan jangka panjang. Banyak negara berkembang memiliki sumber daya alam yang kaya, seperti hutan, tambang, dan minyak bumi sehingga menimbulkan konflik menghadapi tekanan untuk mengeksploitasi sumber daya secara intensif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dalam mencapai tujuan menekan biaya untuk pertumbuhan ekonomi, negara-negara berkembang menekan industrialisasi yang cepat yang menghasilkan residu gas-gas rumah kaca, penggunaan bahan kimia dalam meningkatkan pertanian dapat berdampak negatif bagi kualitas tanah dan air, urbanisasi yang tidak terkendali, meningkatnya ketidaksetaraan sosial ekonomi, serta pengesampingan pengelolaan air dan limbah. Negara berkembang sering harus mencari keseimbangan yang tepat antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan dampak jangka

panjang terhadap lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keadilan.

Hampir setiap negara saat ini telah berkomitmen, setidaknya di atas kertas, terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Laporan Brundtland (1987), publikasi pertama yang memperkenalkan konsep ini, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka” (World Commission on Environment and Development, 1987, hlm. 43). Konsep pembangunan berkelanjutan tidak tumbuh dari gerakan lingkungan seperti gerakan eco-development, yang menekankan pada pembangunan akar rumput dan pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, ini adalah produk dari reaksi arus utama terhadap radikalisme gerakan lingkungan, yang mengusulkan batas-batas pertumbuhan ekonomi untuk menghentikan degradasi ekologi (Castro, 2004). Kini, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang kompleks telah dipadatkan menjadi agenda global tahun 2030 bernama Sustainable Development Goals (SDGs), kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). Meskipun tujuan spesifiknya

berbeda, inti dari keduanya tidak jauh berbeda: berusaha mengkombinasikan pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta inklusi sosial (Sachs, 2012). Selain itu, keduanya juga sama-sama menggambarkan dunia dengan bahasa krisis, dan karenanya membutuhkan manajemen dan intervensi dari perencana pembangunan, kemudian menentukan siapa yang memiliki wewenang untuk bertindak dan menetapkan dasar pengetahuan yang membingkai tindakan tersebut. Terlepas dari perbedaan preferensi masing-masing negara dalam mengaplikasikan pilar-pilar SDGs, setidaknya kita bisa menyimpulkan dengan pasti bahwa agenda ini berusaha menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Kendati begitu, mengingat konsep pembangunan berkelanjutan dibingkai dalam ideologi dominan dan teori ekonomi arus utama, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi krisis lingkungan tampak seperti jawaban bisnis sebagaimana biasanya (Liodakis, 2010). Bagi PBB, kemiskinan perlu dikurangi karena telah dan masih menjadi penyebab degradasi lingkungan. Oleh sebab itu, degradasi lingkungan baru akan berkurang kalau kemiskinan berkurang. Untuk mengurangi kemiskinan, negara-negara berkembang perlu memacu pertumbuhan ekonomi, yang berarti perlu ada pasar yang lebih

bebas. Selain itu, menurut konsepsi ini, negara-negara maju juga harus mentransfer pengetahuan, modal, dan teknologi ke negara-negara terbelakang. Ini merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa bisnis di negara-negara Utara akan terus mengakumulasi modal dengan menjual keahlian, modal, dan teknologi ke negara-negara Selatan. Ideologi ini, tanpa aspek lingkungan, telah ada sebelum krisis lingkungan (Castro, 2004). Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan terdengar mencurigakan karena mengusung solusi yang sama dengan pembangunan lama (old development), terutama dalam mengakhiri kemiskinan: meningkatkan tingkat pendapatan rumah tangga. Istilah "berkelanjutan" lebih merupakan apa yang dapat ditanggung oleh pasar, bukan bumi; apa yang awalnya berarti menyesuaikan teknosfer industri agar tidak merusak planet ini sekarang telah menunjukkan kekuatan regeneratif ekonomi, tidak peduli bagaimana hal tersebut dapat merusak lingkungan. Dalam konteks ini, meskipun sering diklaim sebagai jalan tengah antara Utara dan Selatan, paradigma pembangunan berkelanjutan tidak memberikan ancaman serius terhadap ideologi neoliberal yang dominan karena tidak ada seruan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi atau transformasi sistem kapitalis. Penekanan Brundtland pada penciptaan kekayaan untuk

mengatasi kemiskinan bisa dibilang meremehkan hubungan antara konsumsi yang berlebihan dan degradasi lingkungan.

Sementara itu, pertanyaan siapa yang harus menanggung beban lingkungan masih menjadi arena saling tuduh-menuduh. Dengan adanya agenda global seperti MDGs dan SDGs, negara-negara maju sebenarnya telah mengakui tanggung jawab historis mereka dalam menyebabkan masalah lingkungan dan bahwa mereka terus menjadi kontributor utama terhadap masalah ini. Melalui Global Environment Facility dan mekanisme serupa lainnya, mereka telah mengakui bahwa negara-negara miskin membutuhkan bantuan untuk mengimplementasikan SDGs. Sebaliknya, negara-negara berkembang menerima bahwa masalah-masalah lingkungan global ini akan merugikan semua orang—Utara maupun Selatan, kaya maupun miskin—sehingga memerlukan tindakan pencegahan. Namun, mengingat begitu sulitnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan secara bersamaan, ada perdebatan pelik tentang siapa yang harus mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan siapa yang harus mengutamakan kelestarian lingkungan. Misalnya, apakah penggunaan historis menciptakan semacam hak hukum untuk terus

berproduksi pada tingkat tertentu, atau haruskah negara-negara membayar kompensasi atas bagian dari sumber daya global yang mereka gunakan secara berlebihan di masa lalu? Meskipun prinsip “common but differentiated responsibilities” telah diadopsi secara luas, prinsip ini tidak banyak membantu menyelesaikan konflik kesetaraan dalam diplomasi lingkungan. Prinsip ini memungkinkan Selatan untuk melemparkan tanggung jawab lingkungan pada Utara, sementara Utara berargumen bahwa tingkat emisi karbon di masa depan harus menjadi tanggung jawab bersama walaupun secara historis mereka mengeluarkan emisi lebih banyak. Kepentingan negara maju sering kali menang dalam tawar-menawar ini (Kamal Uddin, 2017).

Konflik kepentingan semacam itu dapat dilihat dalam perdagangan karbon (carbon trading). Tujuan perdagangan karbon adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca demi memperlambat pemanasan global. Setiap negara mengeluarkan dan mempertahankan batas keseluruhan emisi karbon dioksida mereka, di mana mereka dapat memperdagangkan hak untuk sejumlah emisi tertentu. Negara-negara (atau perusahaan-perusahaan) yang lebih kaya akan memberikan subsidi kepada negara-negara berkembang dengan membeli kredit mereka,

dan dengan kemajuan teknologi dan batas emisi bersama di seluruh wilayah, semua negara secara teoritis akan mengeluarkan lebih sedikit karbon. Di atas kertas, dalam skenario yang benar-benar inklusif, semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang terpapar oleh emisi, seharusnya memiliki suara dalam tawar-menawar harga karbon. Namun pada kenyataannya, perdagangan karbon merupakan proses yang sangat politis, multi-aktor, dan hierarkis (Lederer, 2017). Faktor-faktor seperti kemampuan membayar, masalah penagihan, dan kurangnya konsensus di antara para pemain yang lebih kecil telah melemahkan mereka untuk melindungi keuntungan mereka. Selain itu, perdagangan karbon juga menimbulkan bahaya moral karena perusahaan-perusahaan besar terkesan dapat membayar untuk menghindari kewajiban etis mereka dalam mengurangi pemanasan global (Hidayat, 2023). Dengan mereduksi wacana menjadi hanya tentang karbon dan uang, perdagangan karbon tidak banyak membantu dalam meringankan masalah yang dihadapi masyarakat biasa di seluruh dunia. Justru, karena ujung-ujungnya negara-negara Selatan harus menanggung beban lebih besar dari perubahan iklim, kebijakan ini hanya memperlebar jarak ketidaksetaraan yang sudah ada antara negara-negara Utara dan negara-negara Selatan.

Hal tersebut menimbulkan dilema yang sangat pelik bagi negara-negara berkembang. Di satu sisi, untuk alasan-alasan yang jelas, mereka membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan cepat untuk menghapus kemiskinan, kelaparan, ketidaksetaraan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. Namun di sisi lain, mereka juga dituntut untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya. Padahal, sebagian besar proses pembangunan di negara-negara berkembang sangat bertumpu pada perluasan pertanian dan industri, yang biasanya memakan sumber daya dan merusak lingkungan (Combes Motel dkk., 2014). Pada akhirnya, mereka cenderung mencapai yang satu dengan mengorbankan yang lain, dan biasanya lingkunganlah yang menjadi korban malang (Persadie & Ramlogan, 2005). Dalam situasi seperti ini, negara-negara maju terus menggenjot perekonomian mereka tanpa terlalu memusingkan dampak lingkungannya karena percaya bahwa negara-negara berkembang akan mengimbangi kelebihan karbon mereka dengan hutan yang luas dan lebat. Namun, pada saat yang sama, negara-negara berkembang memilih untuk membatasi hutan mereka bukan hanya demi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga karena merasa masalah iklim global—secara historis—merupakan tanggung jawab negara-negara maju. Alhasil, semua indikator lingkungan saat ini menunjukkan bahwa sumber daya kita bergerak

ke arah yang berlawanan (Glasby, 2002; Swain, 2018). Bagi negara-negara berkembang, seruan pembangunan berkelanjutan lewat SDGs lebih merupakan mimpi yang tidak bisa diwujudkan.

Ada banyak contoh tentangnya. India, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat, berusaha mewujudkan target ambisius dua digit sebesar 10 persen dengan menekankan pada sektor manufaktur yang akan membantu mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Ini bukan saja meningkatkan pendapatan per kapita mereka, tetapi juga meningkatkan tingkat emisi karbon mereka yang berpotensi melemahkan posisi global India dalam menanggapi perubahan iklim—dan itu berarti mengurangi (atau bahkan memutus) hibah internasional untuk mereka (Khalid dkk., 2021). Di Meksiko, pilar kedua SDGs “Zero Hunger” telah memberikan izin gratis kepada perusahaan untuk memberikan makanan bergula tinggi kepada anak-anak, kemudian mereka menyamakannya sebagai upaya untuk mengakhiri kelaparan. Alih-alih mengurangi kelaparan, tindakan seperti itu malah memperparah obesitas dan diabetes pada anak-anak di Meksiko (Fernández, 2020). Di Mesir, upaya memacu pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan degradasi

lingkungan yang sangat besar, padahal perekonomian mereka sangat rentan oleh perubahan iklim, yang menjadikannya seperti dilema ayam dan telur (Yousri & Richter, 2019). Di Malaysia, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan tampak seperti permainan jungkat-jungkit: ketika satu sisi naik, sisi lainnya turun (Husain dkk., 2022). Di Nigeria, kebijakan-kebijakan pemerintah bahkan tidak mampu untuk menghentikan pencemaran lingkungan oleh perusahaan-perusahaan besar, khususnya Shell Petroleum Development Company yang membuang limbah pengeboran minyak begitu saja tanpa diolah (Ejumudo, 2015). Hal itu terjadi akibat buruknya kecenderungan, tanggapan, dan partisipasi badan-badan korporat, kelompok-kelompok kepentingan, dan perorangan. Masalah serupa juga tampaknya terjadi di Indonesia. Peraturan seperti Undang-Undang Cipta Kerja mengindikasikan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan menjadi terabaikan (Nurwanty dkk., 2022).

Artikel ini akan menganalisis sejumlah dilema negara-negara berkembang dalam menghadapi pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai norma global, terutama melalui

agenda SDGs. Di satu sisi, mereka memiliki kebutuhan untuk melindungi lingkungan seperti yang dianjurkan negara maju, di sisi lain, ada kebutuhan mendasar untuk pembangunan, yang segala indikatornya juga ditentukan oleh negara maju. Dalam pandangan kami, fungsi SDGs adalah untuk memberi sinyal bahwa ketidaksetaraan global telah diakui sebagai suatu masalah, serta untuk mensimulasikan tindakan tegas untuk mengatasinya. Namun, SDGs sepenuhnya mengikuti tradisi kebijakan pembangunan lama, yang dibentuk dalam konteks Perang Dingin dan dekolonisasi Barat agar negara-negara yang telah merdeka tidak membelot ke penjajah. Ini dilakukan dengan menjanjikan kepada mereka bahwa mereka bisa menjadi, dengan dukungan Barat, negara-negara makmur atau “maju” dalam tatanan ekonomi dunia kapitalis. Janji ini menjadi kenyataan hanya untuk sebagian kecil negara – dan lebih sedikit lagi cerita dari miskin menjadi kaya. SDGs adalah pembaharuan dari janji ini. Hasilnya, kekuasaan ekonomi tetap berada di negara-negara maju, tidak ada perubahan, sedangkan negara-negara berkembang dituntut melalui SDGs untuk menanggung beban lingkungannya. Padahal, merekalah yang sebenarnya paling membutuhkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di sini kami akan menganalisis paradigma pembangunan berkelanjutan sebagai mekanisme kekuasaan-pengetahuan,

kemudian mengapa paradigma ini tidak mengakomodir keadilan ekologis, meskipun secara teoretis berusaha menyelesaikan dilema pelik antara ekonomi dan lingkungan. Terakhir, kami akan menunjukkan bahwa secara keseluruhan, utamanya melalui SDGs, paradigma ini telah (dan masih akan) gagal dalam menyelesaikan dasar masalah yang ada saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif desk study untuk mengeksplorasi kondisi diametrik antara sustainable development dan keadilan ekologis bagi negara-negara berkembang. Sumber data diperoleh dari studi-studi terdahulu terkait topik tersebut baik berupa jurnal maupun pemberitaan. Data kemudian diolah dan dianalisis untuk mencari simpul keterkaitan antara sustainable development dan keadilan ekologis terutama di negara-negara berkembang yang berkecenderungan menghasilkan konflik ditengah masyarakat.

PEMBAHASAN

Paradigma Sustainable Development yang Teknokratis

Sustainable Development menjadi paradigma kebijakan modernisasi ekologi yang berusaha menengahi persoalan trade-off antara pandangan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Nampaknya, paradigma kebijakan ini menjanjikan keindahan di masa

depan dengan berupaya menyeimbangkan dua konsep kunci, yaitu kebutuhan dan batasan dalam konteks keadilan intragenerasi dan antargenerasi. Dalam hal ini, mereka mengamini bahwa aspek ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan mampu berjalan beriringan guna menjawab kebuntuan ekonomi versus lingkungan hidup, dimana dimensi keberlanjutan membawa kesadaran bagi seluruh entitas bahwa pembangunan juga harus mematuhi batasan fisik atau daya dukung lingkungan sehingga pertimbangan keadaan lingkungan harus terinternalisasi dalam seluruh sektor kebijakan. Namun, dibalik keindahan metafix Sustainable Development-kemampuannya dalam menyatukan keseluruhan entitas dengan kesan yang dikemas dalam netralitas ideologinya-dinilai sebagai konsep yang ambigu dengan kompleksitas penafsirannya dan cenderung memicu kontroversi. Neil Carter (2007) mengungkapkan bahwa konsep Sustainable Development memuat ketidakjelasan yang justru mampu menjadi kelemahan sekaligus kekuatan bagi banyak kepentingan politik dan ekonomi untuk terintegrasi di bawah satu kepemimpinan bendera. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tentu ini akan berimplikasi terhadap kesulitan para pembuat kebijakan untuk mengelola

gagasan-gagasan longgar dari Sustainable Development menjadi suatu kebijakan-kebijakan praktis yang lagi-lagi berimplikasi terhadap multitafsir dimensi 'keberlanjutan' yang berpotensi disalahgunakan sebagai alat politik. Pearce dkk. (1989: 173-85) menganalogikan sebagaimana 'galeri' yang berisikan lebih dari empat puluh definisi, dimana definisi yang paling banyak digunakan adalah definisi yang diambil dari Laporan Brundtland, Hal tersebut yang pada akhirnya mendorong berbagai perdebatan persoalan pendefinisian Sustainable Development sebagai bentuk akibat dari ketidakjelasan yang menimbulkan ragam perspektif.

Selanjutnya, apakah akan menjadi 'masalah' apabila terdapat begitu banyak versi pembangunan berkelanjutan dengan perbedaan pendapat mengenai makna nya? Apa bedanya dengan konsep politik, seperti demokrasi dan keadilan? Salah satu pandangan menyatakan bahwa tanpa pemaknaan yang jelas, hampir semua hal dapat diberikan label 'berkelanjutan' sehingga konsep pembangunan berkelanjutan hanya menyisakan slogan politik belaka. Ketidakjelasan ini semakin didukung dengan tidak termuatnya kerangka kerja secara terinci dalam Laporan Brundtland yang justru memungkinkan untuk membantu masing-masing negara

dalam mengelola gagasan yang luas ini menjadi langkah-langkah kebijakan praktis. Namun, kebebasan bagi setiap negara dalam mengekspresikan dimensi 'keberlanjutan' nya, menghasilkan berbagai gagasan yang justru bertentangan dengan agenda utama dari paradigma kebijakan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. (Dryzek 2005: 146), penyebaran makna bukan hanya sekedar klarifikasi akademis atau praktis, melainkan sebuah proses politis dari suatu kepentingan yang berupaya mencoba mempengaruhi klaim mereka, dalam hal ini pemangku kebijakan, berada di koridor pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan tujuan mereka. Berbeda dengan konsep politik lainnya, seperti demokrasi dan keadilan, pembangunan berkelanjutan secara luas dipandang sebagai 'hal baik' dan mempunyai makna yang masuk akal dan diterima secara umum dalam batas-batas yang luas, tetapi dalam parameter tersebut terdapat kontestasi yang lebih dalam seputar dasar terhadap gagasan-gagasannya. Dengan kata lain, pesan optimis yang ditawarkan oleh pembangunan berkelanjutan adalah sesuatu 'untuk semua orang' dan memungkinkan semua aktor untuk berbicara dalam bahasa yang sama, tetapi mempunyai pemaknaan yang berbeda bagi setiap entitas atau individu yang berbeda pula. Orientasinya tidak lagi berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik, tetapi mengarah

terhadap akumulasi kepentingan politik para elit.

Richardson (1997: 43) begitu mengecam pembangunan berkelanjutan karena dianggap sebagai 'kesalahan politik' yang berupaya memaksakan diri menjembatani antara pendekatan antroposentrisme dan ekosentrisme dalam politik. Tentu, sejatinya wacana pembangunan berkelanjutan lebih berfokus pada dampak kerusakan lingkungan terhadap potensi pertumbuhan ekonomi dan bukan pada dampak negatif pertumbuhan ekonomi. Paradigma pembangunan berkelanjutan tidak menentang gagasan kemajuan dan rasionalitas ekonomi yang ada, tetapi tetap mengutamakan konsumerisme industri. Daripada mempertanyakan gagasan PDB, GNP atau efisiensi pasar yang merupakan indikator utama rezim pembangunan, pembangunan berkelanjutan hanya memperkuat model pertumbuhan ekonomi saat ini dengan menambahkan konsep-konsep seperti pencegahan polusi, daur ulang, pengelolaan produk dan pengelolaan lingkungan (Banerjee, 1998 ; Visvanathan, 1991). Logika modal dan pasar tidak pernah dipertanyakan-dan meskipun memiliki niat baik-gagasan Brundtland tentang pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan dan menerapkan logika serupa secara global. Definisi yang menggunakan perspektif global biasanya dimasukkan ke dalam definisi monokultural "global",

yang didefinisikan berdasarkan persepsi dunia yang dianut oleh para penguasanya (Escobar, 1995).

Banyak sekali gambaran kota-kota Dunia Ketiga yang tercemar di media tanpa mengakui tanggung jawab negara-negara industri-meskipun permasalahan lingkungan seperti polusi tidak mengenal batas-batas nasional atau regional-yang mengkonsumsi 80% aluminium, kertas, besi dan baja dunia; 75% energi dunia; 75% sumber daya ikannya; 70% CFC-nya merusak ozon dan 61% dagingnya (Renner, 1997). Daerah-daerah termiskin di dunia menghancurkan atau mengeksport sumber daya alam mereka untuk memenuhi kebutuhan negara-negara kaya atau untuk memenuhi kebutuhan pembayaran utang yang timbul dari langkah-langkah “penghematan” yang ditentukan oleh Bank Dunia. Sungguh ironis sampai pada titik absurditas bahwa negara-negara termiskin di dunia harus melakukan ‘penghematan’ dalam pembangunan mereka sementara negara-negara kaya terus menikmati standar hidup yang bergantung pada langkah-langkah ‘penghematan’ yang dilakukan oleh negara-negara miskin. Misalnya, di India, lahan luas yang digunakan oleh komunitas petani ditetapkan sebagai ‘cagar alam harimau’ untuk dinikmati oleh wisatawan asing dan elit lokal,

sementara komunitas yang bergantung pada tanah untuk makanan mereka terpaksa digusur, seperti yang terjadi pada masyarakat Chenchu, komunitas di India Selatan. Masyarakat membayar untuk perlindungan harimau sementara tidak ada yang membayar untuk konservasi komunitasnya, hal ini telah mereka lakukan selama ribuan tahun (Guha & Martinez-Alier, 1997). Solusi alternatif yang diusulkan oleh suku Chenchu tidak mendapat pertimbangan serius dari pejabat pemerintah negara bagian: usulannya adalah memindahkan semua harimau ke ibu kota Hyderabad setelah mengevakuasi seluruh penduduknya, dan menetapkan kota tersebut sebagai ‘cagar alam harimau’.

Fenomena terbaru—dimana Indonesia dengan ambisi besarnya untuk membangun proyek Rempang Eco-City—berujung pada aksi perlawanan masyarakat adat dan represi aparat. Pengembangan kawasan ekonomi baru ini dinilai tidak hanya melanggar hak konstitusi masyarakat setempat, tetapi mampu memberikan ancaman besar bagi kerusakan lingkungan. Hal tersebut ditilik melalui rencana pemerintah dalam menjalin kerjasama dengan salah satu produsen kaca asal Cina yang menyatakan minatnya secara terang-terangan untuk menjadi

bagian dari investor dari proyek ekonomi baru di Rempang. Manajer Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat Eksekutif Nasional WALHI, Ferry Widodo mengungkapkan bahwa pembangunan pabrik kaca di salah satu titik kampung di Rempang akan menyebabkan sumbangsih emisi dalam skala besar. Tentunya emisi ini mampu berimplikasi terhadap kerusakan ekosistem di wilayah pesisir tersebut, seperti terumbu karang dan memungkinkan potensi adanya tindakan reklamasi.

Pembangunan berkelanjutan berupaya untuk mendamaikan kepentingan-kepentingan yang berlawanan dan bertujuan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan lingkungan secara bersamaan. Hal ini merupakan suatu kontradiksi karena keberlanjutan dan pembangunan didasarkan pada asumsi-asumsi yang sangat berbeda dan seringkali tidak sejalan. Mempertahankan, berarti mendukung dari bawah, menyediakan makanan, adalah tentang kepedulian dan kepedulian, sebuah konsep yang jauh dari pembangunan, yang merupakan tindakan kontrol, sering kali merupakan program kekerasan, yang diorganisir dan dikelola oleh negara-bangsa, lembaga internasional dan perusahaan bisnis yang beroperasi di bawah prinsip ilmu pengetahuan barat modern (Visvanathan, 1991). Kepedulian terhadap lingkungan hidup yang diartikulasikan dalam wacana

pembangunan berkelanjutan merupakan kekhawatiran karena mengancam keberlanjutan sistem perekonomian. Pendekatan ini berasumsi bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memberi harga pada 'aset' lingkungan hidup. Kebijakan lingkungan yang ada saat ini didasarkan pada logika ini dan tidak mengatasi dampak buruk dari kebijakan tersebut terhadap jutaan orang yang bergantung pada lahan untuk bertahan hidup dan bagi mereka yang menganggap lingkungan hidup bukanlah masalah kualitas hidup, melainkan masalah kelangsungan hidup (Guha, 1989).

"...while attracting the criticism that it is an empty slogan with little substance" (Carter, 2007). Apabila visi pembangunan berkelanjutan ingin mempunyai tujuan emansipatoris, maka diperlukan rekonseptualisasi terhadap gagasan kemajuan dan pembangunan saat ini. Konsep-konsep ini tidak hanya membatasi, tetapi juga mencerminkan kegagalan imajinasi. Pendekatan teknokratis barat hanya berfungsi untuk memberdayakan kepentingan ekonomi korporasi dan nasional serta menghalangi masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam mengendalikan sumber daya mereka. Pembongkaran gagasan pembangunan diperlukan dan konsep keberlanjutan harus melampaui upaya kompromi antara perlindungan lingkungan

dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini melibatkan pembalikan perampasan alam oleh industri serta mengakui batasan struktural dan alami dari pembangunan berkelanjutan (Redclift, 1987). Kita perlu merangkul bentuk-bentuk pengetahuan lain, betapapun 'tradisional' definisinya, dan menafsirkan pengetahuan-pengetahuan ini dalam istilah ekonomi, ilmiah, politik, budaya, dan sosial yang menantang pandangan yang ada tentang dunia dan alam. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya soal efisiensi manajerial (walaupun hal ini juga mempunyai peranan), ini tentang memikirkan kembali hubungan manusia-alam, mengkaji ulang doktrin-doktrin kemajuan dan modernisasi saat ini, dan mengutamakan visi-visi alternatif mengenai dunia. Hal ini membutuhkan penelusuran kembali langkah-langkah ke titik di mana 'alam' berubah menjadi 'lingkungan', menjauhkan alam dan memposisikannya sebagai sumber daya yang harus dikuasai dengan cara yang sama seperti perasaan dan ekspresi manusia dikuasai melalui 'kebudayaan'.

Sustainable Development Tidak Mengakomodir Keadilan Ekologis?

Dalam proses mencapai tujuan sustainable development

(pembangunan berkelanjutan) ada negara yang bisa dianggap mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan SDGs. Seperti angka kemiskinan di suatu negara yang tidak menurun, tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, hingga kesejahteraan warga negara yang kurang baik. sebagian negara di Eropa memiliki poin pencapaian SDGs yang cukup tinggi. Dilihat dari hasil laporan yang dirilis berdasarkan penilaian terhadap 163 negara yang melaksanakan SDGs berjudul Sustainable Development Report 2022. Dengan skala menunjukkan angka 100 diartikan bahwa semua tujuan SDGs telah tercapai. Dan hasil laporan 2022 menunjukkan bahwa 3 negara nordik menjadi urutan tiga peringkat teratas. dengan urutan pertama diisi oleh Finlandia dengan skor 86,51; Denmark memiliki skor 85,63; dan Swedia dengan skor 85,19. Hal ini menunjukkan negara-negara tersebut telah dikategorikan berhasil dalam melaksanakan SDGs.

Lantas bagaimana dengan negara yang tidak masuk kedalam negara dengan perolehan skor SDGs terbaik? apakah negara tersebut masih berkonflik dalam mencapai tujuan tersebut?. Negara-negara yang masih berusaha untuk mencapai tujuan SDGs selalu berkonflik dengan tantangan yang terjadi di negara tersebut. Semisal

seperti di Indonesia, dalam pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 1 yaitu hidup tanpa kemiskinan. Dan yang menjadi masalah adalah tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung tinggi, dan tantangan yang dihadapi Indonesia adalah seperti kualitas SDM yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, hingga pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Hal-hal seperti ini yang menjadi konflik bagi sebuah negara untuk mencapai tujuan SDGs. Jika suatu tujuan tidak terlaksana dengan baik maka akhirnya akan mempengaruhi tujuan lainnya.

Dalam hal nya tujuan 1 adalah hidup tanpa kemiskinan, jika kemiskinan terus meningkat maka akan mempengaruhi tujuan 2 yaitu tanpa kelaparan. Semakin tinggi tingkat kemiskinan akan semakin tinggi angka kelaparan yang terjadi. Kemudian jika tujuan 1 dan 2 terus terjadi dan tidak terselesaikan dengan baik, maka tujuan 3 akan sulit dilaksanakan, yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera. 3 tujuan sebelumnya bisa diminimalisir jika warga negara mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Seperti poin 4 yaitu memastikan agar pendidikan yang berkualitas dapat dijangkau oleh semua orang. Bukan seperti itu saja, tantangan bisa datang dari mana saja. seperti halnya tantangan yang datang dari alam, tantangan seperti itu tidak bisa kita prediksi dan kita kendalikan. Akhir tahun 2019, dunia dihadapkan dengan adanya

penyebaran virus Covid-19. hal ini diluar kendali manusia sebelumnya, hingga menyebabkan adanya krisis ekonomi. Ketika krisis kesehatan berubah menjadi krisis ekonomi dunia, dimana tingkat kemiskinan meningkat, kesejahteraan manusia menurun, tingkat pengangguran yang melesat tinggi, dan ratusan negara yang PDB nya menurun seketika. Negara yang memang menerapkan Sustainable Development tidak semua negara memiliki proses dan hasil yang baik. Masih ada negara yang masih harus berkonflik meskipun tengah menerapkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

190 negara telah disahkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Bahwa negara-negara tersebut telah sepakat untuk menjadi bagian untuk bersama-sama mencapai tujuan SDGs. Agenda yang direncanakan untuk selesai pada tahun 2030 nanti, diharapkan 190 negara tersebut bisa mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan sebelum tahun yang ditentukan. Dalam mencapai 17 tujuan SDGs yang sudah disahkan, dibutuhkan peran dunia bersama-sama untuk pengimplementasian agar tujuan yang ada tercapai. Negara-negara yang berpartisipasi dalam pemenuhan tujuan SDGs untuk beberapa tahun mendatang, namun setiap negara memiliki cara dan tantangan nya masing-masing yang membuat hasil akan berbeda dengan negara lainnya. UNESCO

dan 190 negara yang menjadi bagian dari program SDGs semuanya bergabung untuk pengimplementasian tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti agenda Edukasi, Natural Science, Social and Human Sciences, Culture, Communication and Information, dan Sustainable Development for Ocean. Mengimplementasikan SDGs tidak hanya sebatas administrasi, jika melihat output dari tujuan-tujuan tersebut, maka pembentukan negara yang lebih baik akan terwujud. Tidak hanya untuk tujuan pemenuhan SDGs bersama, tetapi proses pembangunan dalam negara akan menjadi hasil yang menguntungkan bagi negara tersebut. Seperti halnya pemulihan pasca pandemi Covid-19, yang menjadi fokus hampir semua negara. tidak hanya memulihkan dan mengantisipasi, namun masa pemulihan kembali itu harus dilakukan. Banyak yang harus dilakukan seperti pemulihan ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, hingga kesenjangan yang terjadi selama Covid-19 terjadi. Melaporkan setiap tahun nya bagaimana perkembangan yang terjadi selama proses pembangunan berkelanjutan, menjadi evaluasi penting dalam proses nya.

Pembangunan berkelanjutan ditetapkan ketika melihat bahwa kondisi yang ada di setiap negara harus dibenahi,

membuat tujuan bersama yang bisa dilakukan oleh setiap negara tidak hanya untuk negara itu sendiri tetapi juga menjadi fokus dunia. Agenda SDGs dibentuk untuk menjawab pimpinan dunia yang ingin mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial hingga perubahan iklim yang terjadi di dunia. dengan 17 tujuan utama dan 169 target yang dijadikan tuntunan kebijakan selama 15 tahun kedepan terhitung sampai tahun 2030. SDGs diciptakan untuk masalah yang sudah ada atau sedang terjadi, dan diharapkan dengan adanya perancangan tujuan dari Sustainable Development ini bisa menurunkan angka masalah yang sedang terjadi dalam negara maupun secara internasional.

Definisi pembangunan sendiri adalah upaya yang secara sadar dilakukan oleh suatu bangsa atau negara untuk mencapai tujuan nasional melalui perubahan dan pertumbuhan secara terencana (S.P. Siagian: 1994). Dan juga menurut Bintoro Tjokroamidjojo mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang secara terencana meliputi dimensi untuk kemajuan kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, hingga memperbaiki kualitas hidup manusia. Oleh karena itu SDGs dibentuk tidak hanya untuk memperbaiki masalah melainkan

juga dengan menyelesaikan dengan melihat apa akar masalah hal tersebut terjadi. Seperti halnya upaya pemerintah dalam mengurangi angka kelaparan dan perbaikan gizi masyarakat. Ketika angka kelaparan tinggi, bisa diartikan tingkat kemiskinan juga tinggi. Lantas, hal apa yang harus dilakukan untuk mengurangi angka kelaparan dan kekurangan gizi masyarakat yang tinggi?. Yaitu dengan fokus menurunkan angka kemiskinan yang tinggi, caranya dengan pemerintah memberikan Bantuan Pangan, Bantuan Pangan non Tunai, Bantuan Tunai Bersyarat, dan bantuan ekonomi maupun jaminan kesehatan kepada masyarakat yang memang ditargetkan. Apabila suatu masalah bisa diidentifikasi akar masalahnya dan proses apa yang harus dilakukan kedepannya, hal itu akan menjadi penyelesaian akar masalah satu sama lain yang menjadi tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan. Dan dengan adanya laporan tahunan dari proses SDGs yang dilakukan, akan menjadi evaluasi penting untuk setiap tujuannya.

PENUTUP

Tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yaitu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, merupakan tujuan yang ambisius dan penting. Namun, solusi yang diusung tampaknya hanya

mengadaptasi solusi lama: meningkatkan tingkat pendapatan rumah tangga. Dalam pengertian ini, masalah lingkungan telah direduksi menjadi persoalan ekonomi semata. Dengan menekankan kemiskinan sebagai penyebab utama, akar masalahnya dianggap terletak di negara-negara berkembang. Anggapan ini menyiratkan tidak perlunya perubahan di bagian Utara. Jika keuntungan secara historis tetap dijadikan proksi untuk kebaikan sosial, peluang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk diterjemahkan menjadi hasil nyata bagi masyarakat yang berkeadilan lingkungan tampaknya tidak mungkin terjadi dalam struktur ekonomi yang ada saat ini. Kekhawatiran lainnya adalah bahwa makna dari "pembangunan" dan "berkelanjutan" itu sendiri masih membingungkan. Ini adalah ladang ranjau semantik, politis, dan sekaligus moral. Keduanya merupakan istilah yang cukup kosong sehingga bisa diisi sesuka hati oleh para pengguna yang berbeda dengan makna dan maksud mereka sendiri, biasanya untuk menggiring masyarakat ke arah yang mereka inginkan. Hegemoni ini mungkin menjelaskan mengapa negara-negara berkembang cenderung menanggung lebih banyak beban "berkelanjutan", mengingat analisis arus utama seringkali menganggap kemiskinan sebagai biang keladi degradasi lingkungan.

Analisis konservatif seperti itu telah menyerap bahasa dan nilai-nilai ekologi ke dalam kategori keuangan dan teknokrasi belaka. Masalah lingkungan, katanya, dapat diselesaikan dengan penggunaan teknologi. PBB melalui agenda SDGs berasumsi bahwa teknologi, seperti halnya pengetahuan dan keterampilan, pada dasarnya harus ditransfer dari inti ke pinggiran. Keyakinan terhadap “alih teknologi” ini mengabaikan fakta bahwa dalam ekonomi politik internasional, teknologi yang “ramah lingkungan” sangat mahal, dan sebagian besar negara berkembang harus mengeksplor sumber daya alam, yang berpotensi menciptakan lebih banyak kerusakan lingkungan, untuk dapat membeli teknologi tersebut. Hal ini membuat agenda dan norma global seperti SDGs lebih menyerupai kedok korporasi dari atas ke bawah untuk mengambil alih sumber daya dunia dengan panji-panji peringatan iklim dan peningkatan pengaruh dalam menetapkan kebijakan energi negara (misalnya, melalui intervensi “Net-Zero” yang sangat meragukan). SDGs telah membentuk sistem penegakan hukum di mana negara-negara harus patuh dan antusias terhadap kepentingan korporasi tingkat tinggi, atau mereka akan dihukum secara finansial. Kemampuan sistem ini untuk mendikte dan

mengendalikan entitas keuangan, lembaga politik dan sosial, serta individu secara eksternal bisa dibilang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dengan latar belakang semacam itu, meskipun janji-janjinya sangat menggiurkan, norma dan agenda global seperti SDGs tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah-masalah dasarnya. Diagnosa yang keliru secara otomatis akan membawa kita pada solusi-solusi yang juga keliru. Terlalu banyak penekanan pada mekanisme pasar, teknologi dan manajemen yang lebih baik, kenyataannya hanya melemahkan perubahan politik, ekonomi dan sosial mendasar yang dibutuhkan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Banerjee, S. B. (n.d.). *Sustainable Development and the Reinvention of Nature*. Critical Management Studies Conference (Environment Stream), Manchester, UK
- Carter, N. (2007). *The politics of the environment : ideas, activism, policy* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Castro, C. J. (2004). *Sustainable Development: Mainstream and Critical Perspectives*. Organization &

- Environment*, 17(2), 195–225.
<https://doi.org/10.1177/1086026604264910>
- Combes Motel, P., Choumert, J., Minea, A., & Sterner, T. (2014). Explorations in the Environment-Development Dilemma. *Environmental and Resource Economics*, 57(4), 479–485.
<https://doi.org/10.1007/s10640-013-9745-9>
- Dryzek, J. S., & Schlosberg, D. (2005). *Debating the Earth : the environmental politics reader*. Oxford University Press.
- Ejumudo, K. B. O. (2015). Sustainable Development in Nigeria: The Policy Gap and Action Dilemma. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 6(1), 78–85.
- Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press.
- Fernández, B. (2020, September 19). *Neoliberal obesity and coronavirus in Mexico*. Al Jazeera.
<https://www.aljazeera.com/opinions/2020/9/19/neoliberal-obesity-and-coronavirus-in-mexico>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), 887–917.
<http://www.jstor.org/stable/2601361>
- Gibbs, J. P. (1965). Norms: The Problem of Definition and Classification. *American Journal of Sociology*, 70(5), 586–594.
<https://doi.org/10.1086/223933>
- Glasby, G. P. (2002). Sustainable Development: The Need for a New Paradigm. *Environment, Development and Sustainability*, 4(4), 333–345.
<https://doi.org/10.1023/A:1024138010770>
- Hidayat, A. (2023). Emerging Global South Carbon Trading: Conflicting Interest of Green Capitalism and Socio-Ecological Justice. *IR-UI Commentaries*, IV(1), 1–5.
- Husain, R., Wahab, N. A., & De Gracious, M. S. (2022). *The chicken and egg dilemma for Malaysian sustainable development plan against the economic development in meeting SDG 13 goal*. 060006.

- <https://doi.org/10.1063/5.0120584>
- Kamal Uddin, Md. (2017). Climate Change and Global Environmental Politics: North-South Divide. *Environmental Policy and Law*, 47(3-4), 106-114.
<https://doi.org/10.3233/EPL-170022>
- Khalid, A. M., Sharma, S., & Dubey, A. K. (2021). Concerns of developing countries and the sustainable development goals: Case for India. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 28(4), 303-315.
<https://doi.org/10.1080/13504509.2020.1795744>
- Kratochwil, F. (1984). The force of prescriptions. *International Organization*, 38(4), 685-708.
<https://doi.org/10.1017/s0020818300026916>
- Lederer, M. (2017). Carbon Trading: Who Gets What, When, and How? *Global Environmental Politics*, 17(3), 134-140.
https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00419
- Liodakis, G. (2010). Political Economy, Capitalism and Sustainable Development. *Sustainability*, 2(8), 2601-2616.
<https://doi.org/10.3390/su2082601>
- Luke, T. W. (1995). *Greening environmental policy : the politics of a sustainable future* (F. Fischer & M. Black, Eds.; pp. 21-32). Paul Chapman.
- Nurwanty, I. I., Afinnas, M. A. A., Rachmawati, I., Hepasari, A. N., & Fauzi, M. (2022). Coal Business in Indonesia Dilemma of Environmental Sustainability and Economic Development. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(3), Article 3.
<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i3.3599>
- Pearce, D., Anil Markandya, Barbier, E. B., Storbritannien. Department Of The Environment, & London Environmental Economics Centre. (1989). *Blueprint for a*

- green economy. 1. - 1989.*
Earthscan.
- Persadie, N., & Ramlogan, R. (2005). Pursuing Development and Protecting the Environment: Dilemma of the Developing World. *Electronic Green Journal*, 1(22).
<https://doi.org/10.5070/G312210613>
- Ramachandra Guha, & Martinez-Alier, J. (2006). *Varieties of environmentalism : essays North and South.* Earthscan.
- Redclift, M. (2016). *SUSTAINABLE DEVELOPMENT : exploring the contradictions.* Taylor & Francis.
- Renner, M. (1997). *Fighting for survival : environmental decline, social conflict, and the new age of insecurity.* Earthscan.
- Richardson, Dick (1997) 'The Politics of Sustainable Development', in Baker et al.
- Sachs, J. D. (2012). From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals. *The Lancet*, 379(9832), 2206–2211.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60685-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60685-0)
- Srivastava, J. (2011). "Norm" of Sustainable Development. *India Quarterly: A Journal of International Affairs*, 67(2), 93–110.
<https://doi.org/10.1177/097492841006700201>
- Swain, R. B. (2018). A Critical Analysis of the Sustainable Development Goals. Dalam W. Leal Filho (Ed.), *Handbook of Sustainability Science and Research* (hlm. 341–355). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-63007-6_20
- World Commission on Environment and Development (Ed.). (1987). *Our common future.* Oxford University Press.
- Yousri, D., & Richter, C. (2019). Sustainable Development and the Dilemma of Egyptian Economic Growth and Climate Change: 1917-2015. *The Academic Research Community publication*, 3(3), 13–25.
<https://doi.org/10.21625/archive.v3i3.519>
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. *Jakarta: Pustaka Pelajar.*

- Irhamisyah, F. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), 45-54.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.71>
- D. Sachs, J., Lafortune, G., Fuller, G., & Drumm, E. (2023). Implementing the SDG Stimulus Includes the SDG Index and Dashboards. *Sustainable Development Report* 2023.
<https://doi.org/10.25546/102924>
- Sachs, J. D., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., & Woelm, F. (2022). Sustainable Development Report 2022. In *Google Books*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781009210058>
- Visvanathan, S. (1991), "Mrs Brundtland's disenchanted cosmos", *Alternatives*, 16 (3).
- United Nations. (2022, December). *Finland ∴ Sustainable Development Knowledge Platform*. Sustainabledevelopment.un.org.
- <https://sustainabledevelopment.un.org/members/tates/finland>
- Banerjee, S. B. (n.d.). Sustainable Development and the Reinvention of Nature. Critical Management Studies Conference (Environment Stream), Manchester, UK
- Carter, N. (2007). The politics of the environment : ideas, activism, policy (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Castro, C. J. (2004). Sustainable Development: Mainstream and Critical Perspectives. *Organization & Environment*, 17(2), 195-225.
<https://doi.org/10.1177/1086026604264910>
- Combes Motel, P., Choumert, J., Minea, A., & Sterner, T. (2014). Explorations in the Environment-Development Dilemma. *Environmental and Resource Economics*, 57(4), 479-485.
<https://doi.org/10.1007/s10640-013-9745-9>
- Dryzek, J. S., & Schlosberg, D. (2005). Debating the Earth : the environmental politics reader. Oxford University Press.
- Ejumudo, K. B. O. (2015). Sustainable Development in Nigeria: The Policy Gap and

- Action Dilemma. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 6(1), 78-85.
- Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press.
- Fernández, B. (2020, September 19). Neoliberal obesity and coronavirus in Mexico. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/opinions/2020/9/19/neoliberal-obesity-and-coronavirus-in-mexico>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), 887-917. <http://www.jstor.org/stable/2601361>
- Gibbs, J. P. (1965). Norms: The Problem of Definition and Classification. *American Journal of Sociology*, 70(5), 586-594. <https://doi.org/10.1086/223933>
- Glasby, G. P. (2002). Sustainable Development: The Need for a New Paradigm. *Environment, Development and Sustainability*, 4(4), 333-345. <https://doi.org/10.1023/A:1024138010770>
- Hidayat, A. (2023). Emerging Global South Carbon Trading: Conflicting Interest of Green Capitalism and Socio-Ecological Justice. *IR-UI Commentaries*, IV(1), 1-5.
- Husain, R., Wahab, N. A., & De Gracious, M. S. (2022). The chicken and egg dilemma for Malaysian sustainable development plan against the economic development in meeting SDG 13 goal. 060006. <https://doi.org/10.1063/5.0120584>
- Kamal Uddin, Md. (2017). Climate Change and Global Environmental Politics: North-South Divide. *Environmental Policy and Law*, 47(3-4), 106-114. <https://doi.org/10.3233/EPL-170022>
- Khalid, A. M., Sharma, S., & Dubey, A. K. (2021). Concerns of developing countries and the sustainable development goals: Case for India. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 28(4), 303-315. <https://doi.org/10.1080/13504509.2020.1795744>
- Kratochwil, F. (1984). The force of prescriptions. *International Organization*, 38(4), 685-708. <https://doi.org/10.1017/s0020818300026916>
- Lederer, M. (2017). Carbon Trading: Who Gets What, When, and How? *Global Environmental Politics*, 17(3), 134-140. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00419

- Liodakis, G. (2010). Political Economy, Capitalism and Sustainable Development. *Sustainability*, 2(8), 2601–2616. <https://doi.org/10.3390/su2082601>
- Luke, T. W. (1995). Greening environmental policy : the politics of a sustainable future (F. Fischer & M. Black, Eds.; pp. 21–32). Paul Chapman.
- Nurwanty, I. I., Afinnas, M. A. A., Rachmawati, I., Hepasari, A. N., & Fauzi, M. (2022). Coal Business in Indonesia Dilemma of Environmental Sustainability and Economic Development. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.18415/ijmu.v9i3.3599>
- Pearce, D., Anil Markandya, Barbier, E. B., Storbritannien. Department Of The Environment, & London Environmental Economics Centre. (1989). *Blueprint for a green economy*. 1. - 1989. Earthscan.
- Persadie, N., & Ramlogan, R. (2005). Pursuing Development and Protecting the Environment: Dilemma of the Developing World. *Electronic Green Journal*, 1(22). <https://doi.org/10.5070/G312210613>
- Ramachandra Guha, & Martinez-Alier, J. (2006). *Varieties of environmentalism : essays North and South*. Earthscan.
- Redclift, M. (2016). *SUSTAINABLE DEVELOPMENT : exploring the contradictions*. Taylor & Francis.
- Renner, M. (1997). *Fighting for survival : environmental decline, social conflict, and the new age of insecurity*. Earthscan.
- Richardson, Dick (1997) 'The Politics of Sustainable Development', in Baker et al.
- Sachs, J. D. (2012). From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals. *The Lancet*, 379(9832), 2206–2211. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60685-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60685-0)
- Srivastava, J. (2011). "Norm" of Sustainable Development. *India Quarterly: A Journal of International Affairs*, 67(2), 93–110. <https://doi.org/10.1177/097492841006700201>
- Swain, R. B. (2018). *A Critical Analysis of the Sustainable Development Goals*. Dalam W. Leal Filho (Ed.), *Handbook of Sustainability Science and Research* (hlm. 341–355). Springer International Publishing.

- https://doi.org/10.1007/978-3-319-63007-6_20
- World Commission on Environment and Development (Ed.). (1987). *Our common future*. Oxford University Press.
- Yousri, D., & Richter, C. (2019). Sustainable Development and the Dilemma of Egyptian Economic Growth and Climate Change: 1917-2015. *The Academic Research Community publication*, 3(3), 13-25.
<https://doi.org/10.21625/archive.v3i3.519>
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). *Konsep dan Teori Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Irhamisyah, F. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), 45-54.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.71>
- D. Sachs, J., Lafortune, G., Fuller, G., & Drumm, E. (2023). *Implementing the SDG Stimulus Includes the SDG Index and Dashboards*. Sustainable Development Report 2023.
<https://doi.org/10.25546/102924>
- Sachs, J. D., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., & Woelm, F. (2022). *Sustainable Development Report 2022*. In Google Books.
- Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781009210058>
- Visvanathan, S. (1991), "Mrs Brundtland's disenchanted cosmos", *Alternatives*, 16 (3).
- United Nations. (2022, December). Finland ... Sustainable Development Knowledge Platform.
[Sustainabledevelopment.un.org](https://sustainabledevelopment.un.org).
<https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/finland>